

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. (1999)
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan*. (1981)
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 *Tentang Tindak Pidana Suap*. (1980)
- _____. Peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2010 *Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Alfian. (2015), Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan Dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa, *Jurnal Pengadaan*, Vol.4 Nomor 1 ISSN 2089-2861
- Ali, M. (2011). *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. UII Press.
- Amiruddin, A. (2012). Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Indonesian Journal of Criminology*.
- Dewi, N. W. P., & Ramantha, I. W. Profesionalisme Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemampuan Investigatif Pada Pembuktian Kecurangan Oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 1029-1055.
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(3).
- Hardjowijono, B., & Muhammad, H. (2007). *Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Isgiyata, J., & Budiyoni, E. (2018). Studi Tentang Teori GONE dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 31-42.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Indonesia, T. I. (2006). *Buku Panduan: Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*.

- Kurniawan, M. R., & Pujiyono, P. (2018). Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh PNS. *Law Reform*, 14(1), 115-131.
- Liu, G., & Liu, S. (2017). Corruption crime and punishment: evidence from China's state corruption audits. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 601-619.
- Mulyana, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurharjanti, N. N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(2), 209-221.
- Rika, R. L. (2016). Korupsi dan Akuntansi Forensik. *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 2(2), 72-91.
- Sastradipraja, U. (2013). Peranan Audit Investigatif Dan Pengendalian Fraud Triangle Dalam Birokrasi Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Publik. *Universitas Tarumanagara Journal of Accounting*, 17(1).
- Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan Fraud dalam Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2).
- Semma, M. (2008). Negara dan korupsi: pemikiran Mochtar Lubis atas negara, manusia Indonesia, dan perilaku politik. Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surachmin, S. C. (2010). *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*.
- Theodorus, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta. Salemba Empat.
- Treisman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. *Journal of public economics*, 76(3), 399-457.
- Tuanakotta, T. M. (2009). *Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi*. Penerbit Salemba.
- Usman, R. (2004). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Widianingsih, R. (2017). Evaluasi Proses Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Melalui Proses Audit Investigatif (Studi pada Kasus Pengadaan Iklan Layanan Masyarakat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta). *Media Riset Akuntansi*, 6(2), 87-102.

Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP. Diakses pada tanggal 29-03-2019 dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/09044561/enam-poin-penting-yang-terungkap-dari-rekaman-johannes-marliem-soal-e-ktp>

Asal-usul Jumlah Kerugian Negara Rp 2,3 Triliun Pada Kasus Korupsi E-KTP. Diakses pada tanggal 29-03-2019 dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/13/asal-usul-jumlah-kerugian-negara-rp-23-triliun-pada-kasus-korupsi-e-ktp?page=all>

Korupsi Pejabat Daerah Terbanyak di Pengadaan Barang-Jasa. Diakses pada tanggal minggu 9 maret 2019 pukul 17:36 dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/03/07/p57vk0318-korupsi-pejabat-daerah-terbanyak-di-pengadaan-barangjasa>

Kasus korupsi pengadaan Al-Quran. diakses pada sabtu 15 maret 2019 pukul 16:50 dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_korupsi_pengadaan_Al-Quran

Begini Modus Korupsi Pengadaan Genset Rp 31,5 Milyar di Ditjen KKP. Diakses : pukul 08.30 WIB - Senin, 17 maret 2019 dari <https://news.detik.com/berita/2932975/begini-modus-korupsi-pengadaan-genset-rp-315-miliar-di-ditjen-kkp>

Bupati Pakpak Bharat Diduga Instruksikan Semua Kepala Dinas untuk Atur Pengadaan. Diakses pada Senin, 24 maret 2019 pukul 19:00 dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/19/00252671/bupati-pakpak-bharat-diduga-instruksikan-semua-kepala-dinas-untuk-atur>

Kasus Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkot Batu, KPK Periksa Dua Pengusaha. Diakses pada Senin. 24 maret 2019 dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/16/kasus-suap-pengadaan-barang-dan-jasa-di-pemkot-batu-kpk-periksa-dua-pengusaha>